

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Banyumas

Santunan Penderes Rp 510 Juta Belum Bisa Disalurkan

<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/117215/santunan-penderes-rp-510-juta-belum-bisa-disalurkan>

PURWOKERTO- Akibat ada perubahan regulasi atau kebijakan, anggaran untuk pemberian santunan ke penderes di Kabupaten Banyumas yang kecelakaan kerja (memanjat pohon kelapa) sejauh ini belum bisa disalurkan.

Padahal, usulan penganggarnya sudah muncul sejak awal tahun ini. Kepala Sub Bagian Sosial dan Kesehatan Bagian Kesra Setda Banyumas, Tasroh, mengatakan, anggaran untuk uang santunan tersebut sedianya direncanakan untuk disalurkan kepada 59 penderes yang kecelakaan kerja dan datanya sudah masuk ke kabupaten untuk dibantu.

"Anggaran yang belum bisa disalurkan totalnya Rp 510 juta untuk 59 penderes. Sampai saat ini belum bisa disalurkan, karena harus menunggu pembahasan perubahan regulasi soal ini dan menunggu bupati definitif dulu," katanya, kemarin.

Belum Bisa Cepat

Meski sudah ada Pj Bupati, yang kewenangannya sama dengan bupati definitif, ini belum bisa dilaksanakan dalam waktu cepat ini. Pasalnya, ini menyangkut perubahan regulasi soal penyaluran untuk penderes yang kecelakaan kerja.

Regulasi yang akan diubah lebih dulu, kata dia, seperti skema klasifikasi cacat, penyaluran dari BKD langsung ke kecamatan. Sebelumnya penyaluran lewat Bagian Kesra dan BKD serta dinas teknis. Dia mengatakan, banyak pendapat dalam penyusunan regulasi baru sehingga sejak Februari belum ada santunan yang bisa diberikan.

"Banyak pendapat dan masukan untuk regulasi baru ini. Kami mengikuti bupati setelah dilantik nanti seperti apa. Kalau ada perintah langsung dicairkan, kami segera lakukan," katanya.

Dia menilai, pencairan anggaran tersebut bisa cepat dan bisa lambat. Menurutnya, ini tergantung pada bupati definitif akan mengambil kebijakan cepat dicairkan atau menyelesaikan terlebih dahulu perubahan regulasi. Jika lebih dulu menyelesaikan perubahan regulasi, maka paling cepat tanggungan pencairan tersebut baru bisa direalisasikan pada akhir tahun 2019. **(G22-37)**